

dapat menghasilkan dan dapat digunakan sebagai mata pencaharian mereka.

2. Saran untuk Dinsosnaker

Pihak Dinsosnaker agar lebih menguasai Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pekerjaannya agar pengaplikasian antara Perda dan kejadian di lapangan dapat selaras.

3. Saran untuk masyarakat Kota Kediri

Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dengan memberikan laporan kepada pihak Dinsosnaker tentang keberadaan pengemis, gelandangan, dan anjal di wilayahnya, selain itu juga tidak memberikan bantuan berupa uang untuk mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Parsudi Suparlan, **Kemiskinan Perkotaan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 11.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum Cetakan 4**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Suratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta, Bandung, 2014.

Winarno Surakhmad, **Pengantar Penelitian Hukum**, Tarsito, Bandung, 1985.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek cet. XII**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Moloeng, Lexy, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

Purwadi Purwacaraka, **Perihal Kaidah Hukum**, Alumni, Bandung, 1978.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013, Pasal 9.

Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 42, Pasal 4 Ayat 1.

INTERNET

Antara, 2015, **Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Bertambah 780 ribu Orang dari September 2014 ke September 2015** (*online*), <http://www.suara.com/bisnis/2016/01/04/211058/bps-akui-angka-kemiskinan-di-indonesia-meningkat>, diakses tanggal 10 Oktober 2015.